



## Penataan Jeron Beteng Libatkan Akademisi

**YOGYA (MERAPI)** - Evaluasi penataan kawasan Jeron Beteng Yogyakarta yang membatasi bus wisata terus dilakukan Pemkot Yogyakarta. Pihak akademisi dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) dan Pusat Studi Pariwisata (Puspar) UGM juga dilibatkan.

Ketua Dewan Peneliti Puspar UGM Prof Muhammad Baiquni, menilai dalam penataan itu lebih melihat dari perspektif cagar budaya. Namun dalam penataan itu harus mengedepankan dialog dengan semua pihak terkait secara bertahap. Pembatasan bus-bus besar di kawasan itu patut diterapkan karena kapasitas jalan yang tidak memungkinkan. Terkait kekhawatiran penurunan kunjungan ke Kraton Yogyakarta menurutnya tidak dipandang dari sisi ekonomi saja.

"Saya kira penurunan senyampang dengan penataan sesuai kapasitasnya sehingga cagar budaya juga terpelihara dan pengunjung nyaman. Wisata Kraton jangan dijual murahlah. Jangan semua menumpuk di sana kan esensi kraton sebagai cagar budaya bisa jadi disepelekan," tutur Baiquni usai rapat dengan tim kajian dan evaluasi dari Pemkot di Balaikota, Rabu (29/4).

Pihaknya juga mengusulkan keberadaan kam-

pung-kampung wisata di sekitar Kraton Yogyakarta juga lebih dikuatkan untuk menarik kunjungan wisatawan. Terkait pelaku wisata di sisi selatan Jeron Beteng yang terdampak itu dapat dilakukan dengan membuka rute ke sana dengan kendaraan sesuai kapasitas jalan seperti mobil elf, shuttle, andong, becak maupun sepeda.

Menurutnya penataan Jeron Beteng harus mempertimbangkan aspek mikro dan makro yang wajib menjadi fokus perhatian kajian. Pihak akademisi ada kajian tesis dan disertasi yang relevan yang dapat dipakai.

"Formulasi penataan terus dikembangkan dan dirumuskan bersama pemkot dengan perspektif pelestarian cagar budaya," ujarnya.

Sementara itu Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta, Aman Yuriadjaya mengatakan pelibatan akademisi itu salah satu bagian dari kajian dan evaluasi ujicoba penataan transportasi wisata di Jeron Beteng. Pemkot akan melibatkan semua pihak. Termasuk komunitas yang terdampak.

"Ini salah satu bagian dari evaluasi. Kami akan libatkan semua pihak agar penataan dapat diterima. Evaluasi ujicoba ini diberikan waktu sebulan," ucap Aman. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3. Dinas Ketertiban 4. Badan Perencanaan Pembangunan 5. Kecamatan/Kemantren Gondomanan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

